

KALURAHAN GIRIKARTO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan; |
|  | b.  c. | Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2019,Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020; |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 10. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); |
|  | 11. | Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasaultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1); |
|  | 12. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); |
|  | 14. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 19. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39); |
|  | 20. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62); |
|  | 21. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 82); |
|  | 22. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girikarto Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 2); |
|  | 23. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 24.  25.  26.  27. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Girikarto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 8); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO

dan

LURAH GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 |

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
   * 1. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 97.193.200,00
     2. Pendapatan Transfer : Rp. 2.239.214.425,00
     3. Pendapatan Lain-lain : Rp. 16.424.891,00

Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.352.832.516,00

1. Belanja Kalurahan :
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Kalurahan: : Rp. 955.377.219,00

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal : Rp. 950.401.900,00
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kal : Rp. 29.769.750,00
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal : Rp. 50.556.000,00
4. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Kalurahan : Rp. 245.987.050’00

Jumlah Belanja : Rp. 2.232.091.919,00

Surplus/(Defisit) : Rp. 120.740.597,00

1. Pembiayaan Kalurahan :
   * 1. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 68.536.676,00
     2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 100.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp. (31.463.324,00)

SILPA tahun berjalan :Rp. 89.277.273,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Laporan Keuangan;
2. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik,

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal Januari 2021

LURAH GIRIKARTO,

T U Y A D I

Diundangkan di Girikarto

pada tanggal Januari 2021

CARIK GIRIKARTO,

SUPARMAN

LEMBARAN KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Girikarto

Kapanewon Panggang

Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2020

Daftar Isi

*halaman*

I Laporan Realisasi APBKal 1

II Catatan Atas Laporan Keuangan 2

A. Informasi Umum 2

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 2

C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 2

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2

2 Pendapatan Asli Kalurahan 2

3 Dana Desa 2

4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 3

5 Alokasi Dana Desa 3

6 Bantuan Keuangan Propinsi 3

7 Bantuan Keuangan Kabupaten 3

8 Pendapatan Lain 3

9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan 4

# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 4

# Belanja Bidang PembinaanKemasyaratan Kalurahan 4

# Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kalurahan 4

# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan 4

# Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi 4

# Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 5

# Pembiayaan 6

# Aset Kalurahan 7

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan per 31 Des 2020 8

Lampiran 2- Rincian Aset Tetap pengadaan Tahun 2020 9



**PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KALURAHAN GIRIKARTO**

**KAPANEWON PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN 2021**